

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang berjudul Peranan Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Bantul penulis akan membahas dan menganalisis peranan partai dalam pendidikan politik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan.

A. Gambaran Umum Pemilih di Kabupaten Bantul

Pendidikan politik oleh partai politik yang dilakukan dalam upaya peningkatan pemahaman politik bagi masyarakat sebenarnya telah diamanahkan oleh undang-undang kita yakni dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Pasal 13 huruf e yang dimana partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya dan kemudian juga dijelaskan secara detail dalam Pasal 31 tentang pendidikan politik tersebut.

Peranan partai politik sendiri selain dari segi yuridis tentunya ada juga dari segi kepentingan kelompok politik. Pendidikan politik dilakukan demi menciptakan kesadaran di masyarakat tentang hak politiknya demi mewujudkan negara yang demokratis. Beberapa poin yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2008 dalam Pasal 21 antara lain:

- (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsadalama rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untukmembangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Sesuai dengan amanah undang-undang diatas artinya sudah jelas salah satu pneranan partai politik yakni dalam hal pendidikan politik. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara realita dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Sebelum masuk kepada pembahasan lebih khusus mengenai pendidikan politik yang dilakukan partai politik penulis melakukan penelitian guna memperoleh suatu data terkait jumlah masyarakat yang dapat menggunakan hak politik.

Penelitian ini penulis telah melakukan penelitian ke kantor KPU Kabupaten Bantul untuk memperoleh data yang valid terkait pemahaman politik di kabupaten bantul dengan acuan data pilkada 2015. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Uraian	Jumlah
1.	Data Pemilih	695.855
2.	Pengguna Hak Pilih	523.817
	Yang tidak menggunakan hak pilih	172.038

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Tabel 4.2

Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Uraian	Jumlah
1.	Data penyandang Disabilitas	1.059
2.	Data Pengguna Hak Pilih penyandang Disabilitas	327

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Dalam hal ini sesuai dengan tabel diatas tentunya kita dapat melihat sendiri bahwa angka golput atau angka yang tidak berpartisipasi politik sangatlah tinggi. Tentu ini menjadi suatu PR besar mengingat demokrasi belum dapat

dikatakan maksimal ketika masyarakatnya masih belum maksimal mengikuti pesta demokrasi di kabupaten bantul.

Tabel 4.3

Data Suara Sah dan Tidak Sah Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	495.089
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	28.728

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Kemudian berdasarkan tabel 4.3 juga menjelaskan bahwa masih adanya ke kurang pahaman politik masyarakat kabupaten bantul selain golput yakni yang menyebabkan adanya surat suara yang tidak sah. Angka surat suara yang tidak sah juga termasuk angka yang besar untuk di kabupaten bantul.

Jumlah angka golput dan suara tidak sah di kabupaten bantul menunjukkan angka yang cukup besar dan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan tentunya menjadi suatu hal dan fenomena yang wajib untuk segera di perbaiki dan di selesaikan.

Terkait Golongan Putih (Golput) atau partisipasi politik yang kurang maksimal, tanggapan pihak KPU Kabupaten Bantul yang diwakili dari pihak KPU Kabupaten Bantul dari Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yakni oleh ibu Titik Istiyawatun.

Menurut ibu Titik Istyawatun tidak sah nya surat suara atau adanya ketidak ikut sertaan masyarakat dalam pemilu bisa jadi dikarenakan kurangnya “pemahaman politik” khususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Bantul.

Menurut beliau terdapat beberapa faktor golput antara lain:

1. Ketidapahaman masyarakat dalam tata cara pencoblosan
2. Protes Voter
3. Menjaga Independensi

Ketiga faktor diatas dijelaskan secara detail sebagai berikut:

1. Ketidapahaman masyarakat dalam tata cara pencoblosan

Jadi menurut beliau banyak masyarakat yang kurang paham dengan tata cara mencoblos sehingga menyebabkan banyak suara yang tidak sah sekitar 28.728 pemilih dalam pilkada 2015. Dan selain itu karena masyarakat banyak yang kurang paham sehingga angka golput dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul yakni sebesar 172.038 orang.

Contoh: alat coblos harus dari KPU, tetapi masyarakat pun bahkan ada yang asal coblos dengan berbagai macam alat yang bukan dari KPU yang menyebabkan surat suara menjadi rusak dan tidak sah, misal dengan api rokok, kemudian surat suara yang belum dibuka semua tapi langsung di coblos yang menyebabkan banyak coblosan karena lipatan belum terbuka semua.

Dalam poin pertama ini, sosialisasi tata cara menjadi kewajiban KPU dengan bekerjasama dengan seluruh elemen termasuk “Partai Politik”, karena menurut beliau KPU hanya melakukan konsolidasi dengan seluruh elemen

tersebut termasuk parpol untuk memberikan pendidikan politik dan kesadaran demokrasi di Masyarakat.

Menurut ibu Titik, partai dalam hal ini tentunya sudah melakukan pendidikan politik dalam hal sosialisasi tata cara karena tentunya ini merupakan kepentingan dari parpol karena apabila masa dari parpol tersebut kurang paham tata cara pasti akan merugikan kelompok mereka sendiri, jadi parpol sudah bekerja keras dalam hal ini.

2. Protes Voter

Protes voter adalah tindakan masyarakat atau kelompok tertentu yang komplain atas hasil pemilu sehingga pendukung dari pasangan calon ada yang lebih memilih untuk golput. Dan menurut narasumber juga golput merupakan hak politik yang cukup rasional tetapi justru akan merugikan seseorang yang golput itu sendiri karena misalkan seseorang ataupun kelompok tertentu tidak mau memilih tentunya hal yang merugikan adalah apabila yang terpilih adalah justru pasangan calon yang kurang baik untuk masyarakat itu sendiri.

Kategori golput dibagi menjadi dua yakni:

1) Pemilih tidak mengetahui adanya pemilu

Artinya sosialisasi dari semua elemen disini belum optimal jika masih ada hal seperti ini, serta kurangnya kesadaran demokrasi dari masyarakat tersebut.

2) Kesengajaan pihak tersebut untuk tidak mau berpartisipasi dalam pemilu

Kemudian terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik juga menurut KPU Kabupaten Bantul sebenarnya sudah cukup maksimal karena partai pasti memiliki kepentingan juga supaya masyarakat paham akan hak politiknya atau secara tidak langsung pendidikan politik sekaligus mengarahkan untuk mendukung partai politik tersebut, namun KPU Kabupaten Bantul sendiri dalam program kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik KPU tidak dapat bekerjasama dengan partai politik karena beberapa faktor antara lain:

- 1) Risiko, karena tidak dapat dipungkiri partai politik memang selalu dikaitkan dengan sebuah kepentingan sehingga KPU Kabupaten Bantul belum ada program untuk bekerjasama dengan partai politik.
- 2) Menjaga Independensi, hal ini juga merupakan alasan yang rasional karena KPU merupakan lembaga independen.

Dari penjelasan diatas berarti pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul diharapkan dapat di konsolidasikan oleh semua elemen, termasuk partai politik disini juga diharapkan dapat lebih masif dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang baik.

B. Program Kerja Partai Politik dalam Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dalam penelitian ini tentunya penulis melakukan studi lapangan langsung ke pihak yang berkaitan dengan judul ini yakni ke beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan data yang valid secara realita

bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Bantul salah satunya kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bantul

Penulis melakukan penelitian ke DPC PDIP Kabupaten Bantul karena PDIP merupakan partai politik yang diakui terbesar di kabupaten bantul. Sehingga perlu kita ketahui seperti apa sebenarnya pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP sehingga menjadi partai yang terkuat di Bantul.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan ketua DPC PDIP Kabupaten Bantul Bapak Arzunadi S.E. menurut beliau sendiri pendidikan Politik tersurat dalam AD ART partai yaitu salah satu fungsi dan kewajiban PDIP adalah mendidik masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan PDIP sendiri dipastikan memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat.

1. Pendidikan politik berdasarkan kebutuhan dasar warga masyarakat

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDIP Kabupaten Bantul antara lain dengan kader-kadernya sendiri yang menjadi jembatan emas bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu terkait dengan kebutuhan dasar warga masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat antara lain:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Kemiskinan

Berdasarkan poin diatas yang dimaksud dari tiap-tiap poin tersebut adalah:

1. Pendidikan

Apabila ada warga bantul yang tidak mampu dalam kemiskinan itu partai hadir melalui kader, pengurus atau fraksinya anggota dewannya untuk menjadi pendamping dan jembatan emas, itu adalah salah satu praktek memberikan pembelajaran dalam hak dan kewajiban warga negara

2. Kesehatan

Ketika ada persoalan kesehatan di masyarakat partai juga hadir melalui kader nya.

3. Kemiskinan

Partai juga hadir ditengah masuarakat ketika ada permasalahan kemiskinan, sehingga partai dapat membuktikan bahwa partai ini mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam hal kemiskinan.

Dalam upaya mengatasi kebutuhan dasar masyarakat seperti ketiga poin diatas DPC PDIP Kabupaten Bantul sendiri langsung terjun kemasyarakatn misalnya dengan mendirikan masjid, bedah rumah, persoalan pertanian, hingga perbaikan aliran sungai.

2. Pendidikan berdasarkan sosialisasi pemahaman hak dan kewajiban dalam pemilu

Menurut Partai PDIP Pendidikan politik dalam hal ini memiliki kepentingan bersayap antara lain:

- a. Agar masyarakat memahami aturan main pemilu, dimotivasi agar masyarakat menggunakan hak politiknya
- b. Kepentingan sayap nya adalah tentunya supaya mengarah ke PDIP sendiri karena setiap parpol pasti memiliki kepentingan kelompok.

Dalam program kerja DPC PDIP Kabupaten Bantul sendiri, partai hadir ditengah masyarakat membantu dalam hal pendidikan, kesehatan dan kemiskinan. Sebagai contoh mulai sejak tahun 1999 DPC PDIP Kabupaten Bantul mulai membangun SDM masyarakat bantul.

Adapun program kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik DPC PDIP Kabupaten Bantul untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat Kabupaten Bantul antara lain:

- a. Pendidikan Politik Jalur Praksis
- b. Pendidikan Sosialisasi Masyarakat
- c. Pendidikan Internal

Yang dimaksud dari ketiga poin diatas adalah:

- a. Pendidikan Politik jalur Praksis

Pendidikan ini merupakan pendidikan praktek yaitu dengan cara hadir mendampingi masyarakat serta memperjuangkan untuk mencari solusi.

- b. Pendidikan Sosialisasi Masyarakat

Pendidikan sosialisasi masyarakat adalah pendidikan terhadap masyarakat umum yang dilakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bantul mengenai peningkatan pemahaman politik dan termasuk hak dan kewajiban politik masyarakat, yang dilakukan dengan mengadakan forum-forum.

Forum tersebut terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1. Forum tingkat kampung
2. Forum tingkat RT
3. Forum tingkat Komunitas
4. Sosialisasi lewat kader

Dalam melancarkan program ini kader-kader ataupun pengurus DPC PDIP Kabupaten Bantul sendiri langsung hadir ditengah masyarakat, karena kader PDIP sendiri cukup banyak jadi hampir 80% DPC PDIP Kabupaten Bantul mengandalkan kadernya untuk bersosialisasi ke masyarakat tentang pemahaman hak dan kewajiban politik dengan beberapa forum antara lain:

c. Pendidikan internal

Pendidikan internal sendiri artinya adalah bahwa pendidikan ini diberikan secara rutin 2 bulan sekali kepada kader-kader PDIP di Kabupaten Bantul yang memiliki tujuan antara lain:

- 1) Penguatan peran kader dalam kehidupan di masyarakat kabupaten bantul.

2) Pendidikan kader serta pematapan kader

Dari pemamaparan diatas tentunya partai juga ada suatu hambatan untuk meningkatkan pemahaman politik di masyarakat Kabupaten Bantul. Hambatan dari DPC PDIP Kabupaten Bantul dalam pendidikan politik sendiri adalah sebenarnya partai sudah memberikan pendidikan politik yang cukup masif akan tetapi kurangnya media yang mengekspose hal tersebut menjadi seakan partai tidak optimal dalam melakukan pendidikan politik.

Berdasarkan hal tersebut diatas artinya DPC PDIP Kabupaten Bantul sendiri sudah melakukan pendidikan politik di masyarakat bantul dengan beberapa program ataupun kegiatan-kegiatan seperti yang dijelaskan diatas karena pendidikan politik masyarakat sendiri merupakan kewajiban bagi PDIP.

C. Program Kerja Partai Politik dalam Pendidikan Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Selain PDIP disini penulis juga melakukan penelitian ke partai Gerindra yang juga merupakan partai yang turut serta dalam pilkada bantul 2015. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan Bapak Darwinto S.ag selaku Sekertaris jendral DPC Gerindra Kabupaten Bantul.

Menurut beliau sendiri pendidikan politik bagi gerindra adalah penjelasan tentang hak politik bagi setiap masyarakat, dan menurut beliau dalam memberikan pendidikan politik gerindra tidak ada paksaan dalam hal memilih ketika pemilihan umum karena dengan alasan indonesia itu demokratis. Menurut beliau pendidikan

politik itu harus dilakukan kepada seluruh masyarakat supaya hak politiknya tidak dirugikan dan demokrasi di Indonesia dapat terwujud.

Pendidikan politik juga menurut beliau lebih mengutamakan demokrasi bukan untuk semata-mata mencari kemenangan karena mentalitas masyarakat harus mulai dirubah mulai dari pemahaman hak politiknya. Sehingga yang menjadi prioritas utama memang pemahaman politik bagi masyarakat dari aspek hak dan kewajibannya supaya masyarakat benar-benar paham. Adapun beberapa program yang berkaitan dengan pendidikan politik Partai Gerindra antara lain:

1. Kaderisasi
2. Sosialisasi
3. Program Kemasyarakatan

Ketiga poin di atas dijelaskan secara detail sebagai berikut:

1. Kaderisasi

Kaderisasi dalam hal ini adalah untuk membangun suatu konstituen ditingkat bawah dan pemahaman politik bagi ditingkat bawah supaya masyarakat paham akan hak politik, dalam hal ini partai menggunakan jaringan-jaringan tingkatan sebagai berikut:

- a. Anak ranting

Anak ranting adalah proses pemberian pendidikan politik serta pemahaman politik terhadap masyarakat di tingkatan dusun.

- b. Ranting

Kemudian di tingkatan ranting berarti pendidikan politik serta pemahaman politik terhadap masyarakat yang dilakukan di tingkatan desa.

c. Pimpinan Anak Cabang (PAC)

Sedangkan pimpinan anak cabang PAC yakni pendidikan politik serta pemahaman politik terhadap masyarakat yang dilakukan di tingkatan kecamatan

d. DPD (Dewan Pimpinan Daerah)

Untuk DPD sendiri merupakan tingkatan tertinggi di kabupaten bantul yang membawahi PAC hingga Anak ranting yang kemudian membangun sistem untuk menguatkan pemahaman politik dimasyarakat untuk menyadarkan arti pentingnya hak politing dengan jaringan jaringan dari anak ranting hingga PAC dengan tujuan supaya terwujudnya negara yang demokratis. Menurut beliau yang penting masyarakat paham politik yang baik, meskipun tidak memilih gerindra tidak menjadi masalah yang terpenting masyarakat paham politik, karena jika masyarakat paham dengan hak politik masyarakat dapat menjadi sosial kontrol.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dalam pendidikan politik bagi DPC Gerindra Kabupaten Bantul memiliki beberapa tujuan yaitu:

a. Supaya masyarakat paham bagaimana politik yang benar

- b. Supaya masyarakat paham bagaimana demokrasi yang baik
- c. Supaya masyarakat paham bagaimana bermusyawarah untuk menyampaikan hak-hak nya.
- d. Supaya masyarakat paham bahwa setiap orang mempunyai hak.

Sosialisasi yang dilakukan partai gerindra ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sosialisasi Internal

Sosialisasi internal dalam hal ini bertujuan untuk pemantapan bagi kadernya sendiri.

b. Sosialisasi Umum

Sosialisasi Umum lebih menitikberatkan kepada masyarakat secara luas dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti.

Beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- 1) Musyawarah desa
- 2) Musyawarah dusun
- 3) Melakukan workshop

Dan tentunya sosialisasi umum ini tertuju pada masyarakat selain kadernya sendiri.

3. Program Kemasyarakatan

Adapun program kemasyarakatan yang dilakukan DPC Gerindra Kabupaten Bantul antara lain:

a. Mencerdaskan Masyarakat

b. Mensejahterakan Masyarakat

c. Mandiri Ekonomi

Yang dimaksud dari ketiga poin diatas adalah:

a. Mencerdaskan Masyarakat

Partai gerindra turun kemasyarakat untuk memperbaiki SDM dengan tujuan mencerdaskan masyarakat seperti misalnya dalam hal pendidikan.

b. Mensejahterakan Masyarakat

Dalam mensejahterakan masyarakat partai melakukan perbaikan dalam bidang kesehatan dan pembangunan.

c. Mandiri Ekonomi

Mandiri ekonomi artinya tidak hanya mengentaskan kemiskinan saja akan tetapi juga menciptakan masyarakat yang mampu mandiri ketika sudah dibantu dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga harapannya ketika kesusahan sudah dihilangkan masyarakat dapat berinovasi secara mandiri supaya tidak terulang lagi masalah yang sama.

Menurut penulis sendiri, dengan adanya program kemasyarakatan ini diharapkan SDM nya dapat lebih baik, karena dibutuhkan suatu fasilitas untuk menciptakan SDM yang lebih baik dan cerdas sehingga tidak hanya menjadi masyarakat yang apatis. Kemudian meskipun sudah secara terstruktur dibuat suatu program untuk melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan

pemahaman politik dimasyarakat Kabupaten Bantul, menurut bapak Darwinto ada beberapa hambatan dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat yaitu antara lain:

a. Pragmatis

Artinya disini masih sering terjadi dimana yang banyak uang itu yang pasti menang, artinya kualitas dapat dikesampingkan dengan uang.

b. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor karena dengan masih adanya kemiskinan di bantul sendiri menyebabkan tindakan yang menghalalkan segala cara tanpa berfikir kebaikan.

c. Mentalitas dan Moralitas

Mentalitas dan moralitas masyarakat masih lemah sehingga belum mampu mandiri.

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan diatas partai gerindra sendiri juga sebenarnya sudah melakukan pendidikan politik di masyarakat secara umum maupun terhadap kadernya sendiri, akan tetapi masih ada beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan pemahaman politik masyarakat.

D. Program Kerja Partai Politik dalam Pendidikan Politik Partai Amanat Nasional (PAN)

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelitian ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantul. Penulis

melakukan wawancara ke DPD PAN Kabupaten Bantul yang diwakili oleh mas Herry Fahamsyah yang merupaka ketua dari Barisan Muda Penegak Amanat Nasional.

Menurut beliau, PAN sebagai partai yang terbuka untuk umum dengan berasaskan pancasila juga tentunya memberikan pendidikan seerta pemahaman politik terhadap kadernya sendiri dan juga terutama bagi masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

Di partai PAN sendiri khususnya di bantul, dalam pendidikan politik selain untuk masyarakat luas partai PAN juga fokus untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda.

Dari hasil penelitian, pendidikan politik yang diberikan oleh DPC PAN Kabupaten Bantul dibagi menjadi dua yakni untuk eksternal dan internal. Kemudian penulis mendapatkan beberapa contoh program kerja DPC PAN Kabupaten Bantul dalam melakukan pendidikan politik, yaitu antara lain:

1. Sekolah Politik Kerakyatan (SPK)
2. Latihan Kader
3. Program Tambahan lainnya

Adapun penjelasan dari ketiga poin diatas adalah:

1. Sekolah Politik Kerakyatan (SPK)

Sekolah Pendidikan Kerakyatan (SPK) adalah salah satu Pendidikan politik yang diberikan oleh DPC PAN Kabupaten Bantul untuk lingkup eksternal. Tugas dari sekolah politik kerakyatan adalah memberikan pendidikan politik

terhadap masyarakat umum, dalam sekolah politik kerakyatan ini selain untuk mahasiswa dan masyarakat luas sekolah pendidikan kerakyatan ini difokuskan untuk para generasi muda serta dilakukan selama 1 bulan dengan konsep penerjunan di masyarakat.

Kegiatannya tersebut bermacam-macam antara lain:

- a) Pengabdian ke masyarakat
- b) Sosialisasi
- c) Hiburan

Adapun penjelasan dari ketiga poin di atas antara lain:

- a) Pengabdian ke masyarakat

Pengabdian ke masyarakat ini dilakukan oleh partai yang langsung terjun ke masyarakat dan membantu masyarakat umum.

- b) Sosialisasi

Partai melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat dengan memberikan pentingnya pemahaman politik bagi masyarakat.

- c) Hiburan

Selain kegiatan-kegiatan yang bernuansa pendidikan, partai juga memberikan kegiatan hiburan seperti halnya misalnya outbond dan sebagainya.

Dalam sekolah politik kerakyatan ini tujuan utamanya memang langsung terjun ke masyarakat dan generasi muda,

sehingga dengan pendidikan politik dalam bentuk Sekolah Politik Kerakyatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman politik masyarakat secara signifikan.

2. Latihan Kader

Latihan Kader tentunya dilakukan terhadap internal sendiri, latihan ini diberikan oleh kader-kader partai untuk pemantapan terhadap kadernya sendiri tentang pemahaman politik.

Dalam latihan ini juga dibagi ke beberapa tingkatan yaitu: 1) Latihan Kader Amanat Dasar 2) Latihan Kader Amanat Madya 3) Latihan Kader Amanat Utama

a. Latihan Kader Amanat Dasar

Tingkatan ini latihan diberikan untuk kader-kader di tingkatan daerah.

b. Latihan Kader Amanat Madya

Dalam latihan kader amanat madya ini diberikan kepada kader-kader partai di tingkatan wilayah.

c. Latihan Kader Amanat Utama

Sedangkan untuk latihan kader amanat utama diberikan ditingkatan pusat.

Latihan kader ini diwajibkan dan dijadikan persyaratan bagi siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Dalam latihan kader sendiri dijadikan sebagai ujung tombak bagi Partai Amanat Nasional untuk

mensosialisasikan terkait program-program parpol dan ideologi Partai Amanat Nasional.

3. Program tambahan lain nya

Selain pendidikan politik diatas tentunya Partai PAN sendiri khususnya DPC PAN Kabupaten Bantul memiliki beberapa program aktif yang juga melibatkan masyarakat serta membangun hubungan dengan masyarakat. Beberapa program tersebut antara lain:

a. Diskusi Publik

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan diskusi terbuka membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan secara aktif 3 bulan sekali.

b. Bakti Sosial

c. Donor Darah

d. Ambulan gratis

Pendidikan politik seperti beberapa program diatas masih terkendala dengan maraknya money politik, meskipun partai sudah berupaya memberikan pendidikan politik tetapi masih saja bisa tergoda dengan money politik yang terjadi ketika pemilihan umum berlangsung khususnya pemilu legislatif karena tingkat apatis masyarakat masih cukup besar.

Kemudian dalam peningkatan pemahaman politik menurut beliau tidak hanya merupakan tanggung jawab partai politik saja akan tetapi juga merupakan

tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik juga seharusnya diberikan sejak dini untuk menghindari praktek-praktek pragmatisme yang dapat menghilangkan idealisme dengan tujuan utamanya supaya masyarakat paham akan hak politik bukan hanya mengarah pada politik praktis.

Partai Amanat Nasional sendiri karena lahir dari tokoh-tokoh yang sebagian dari Muhammadiyah, maka kaderisasi nya pun ada beberapa lewat generasi muda misalkan IPM nya dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas terkait Partai Amanat Nasional, dari segi pendidikan politik tentunya sudah dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat atau pun kadernya sendiri meskipun ada beberapa hambatan hambatan seperti *money politik* dan sebagainya, namun partai sudah ber upaya untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

E. Persamaan Pendidikan Politik Yang di Lakukan Oleh Partai PDIP, Gerindra dan PAN

Dalam penelitian ini penulis akan mengklasifikasikan persamaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai PDIP, Gerindra, dan PAN menjadi dalam beberapa kategori antara lain:

1. Pendidikan politik eksternal

Pendidikan politik eksternal dari partai adalah dimana paartai politik memberikan pendidikan terhadap eksternal dari partai itu sendiri dalam arti masyarakat luar, sehingga partai tidak hanya fokus memberikan pendidikan

terhadap kadernya saja tetapi partai juga turun serta kemasyarakatan dengan memberikan pentingnya pemahaman politik terkait hak dan kewajiban politik sebagai masyarakat yang demokratis. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan politik dalam ranah eksternal antara lain:

a. Sosialisasi Politik:

Dari tiga partai yang sudah dilakukan penelitian menunjukkan semua partai melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pesta demokrasi. Hal ini dimaksudkan supaya hak-hak politik masyarakat juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Dalam sosialisasi ini partai melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang terbuka untuk umum dengan pemberian materi tentang pendidikan politik terkait peningkatan pemahaman politik masyarakat. Contoh kegiatan ini antara lain:

- Workshop
- Seminar-seminar
- Forum-forum diskusi

b. Penerjunan Kader

Dalam kegiatan ini partai politik mengandalkan setiap partainya untuk turun langsung ke masyarakat, partai memberikan pemahaman kepada setiap kadernya serta pemantapan, kemudian kader-kader partai tersebut dilepas ke masyarakat umum untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pendidikan

politik. Dalam penerjunan ini menjadi salah satu andalan dari partai politik karena dengan ini lebih mudah partai menyebar ke setiap lini masyarakat.

2. Pendidikan politik Internal

Pendidikan politik internal adalah dimana partai melakukan pendidikan politik terhadap internal kader-kader partai ataupun pengurus partai itu sendiri yang bertujuan untuk pemantapan terhadap kader partai supaya kader partai itu mampu secara mandiri dan dapat berkontribusi di masyarakat dalam melakukan pendidikan politik di masyarakat. Pendidikan internal ini dari setiap partai adalah salah satu yang dimasifkan, karena bertujuan menciptakan kader yang berkompeten dan kader partai juga yang bersentuhan langsung kemasyarakat.

Beberapa program partaidalam Pendidikan politik internal antara lain adalah:

a. Kaderisasi

Kaderisasi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan partai politik yakni dengan melakukan recruitmen yang kemudian kader-kader baru itu diberikan pembekalan. Setelah melalui proses kaderisasi para kader baru di berikan pelatihan kader.

b. Pelatihan Kader

Dalam kegiatan ini kader-kader partai diberikan pelatihan secara rutin setiap 2-3 bulan sekali. Dalam kegiatan ini pun dari partai mewajibkan untuk para kadernya mengikuti kegiatan ini. Tentunya juga dalam latihan kader ini ditujukan

sebagai pemantapan terhadap para kader untuk mewujudkan kader partai yang berkualitas.

Dalam pelatihan ini juga diberikan training-training dan sosialisasi terkait Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik di masyarakat supaya para kader siap ketika diterjunkan kemasyarakat untuk mentransformasikan ke masyarakat nilai-nilai politik yang baik dan benar serta demokratis.

3. Program Kemasyarakatan

Salah satu langkah parpol untuk dapat dekat dan terjun kemasyarakat adalah partai juga melakukan program kemasyarakatan. Dengan kegiatan ini memang terbukti masyarakat pun respect dengan kehadiran partai politik. Dengan kegiatan ini juga sekaligus menunjukkan kepedulian partai terhadap masyarakat umum dan juga memperlihatkan bahwa partai tidak hanya semata-mata kepentingan politik saja tetapi menunjukkan kontribusi untuk membangun masyarakat yang lebih maju dari segi infrastruktur maupun dari segi mentalitas dan juga moralitas masyarakat umum. Maka dari itu hampir semua partai politik melakukan kegiatan ini yang salah satunya selain hadir di masyarakat juga tentu untuk mengambil simpati dan hati masyarakat.

Beberapa kegiatan kemasyarakatan tersebut antara lain:

- a. Bantuan Pendidikan
- b. Bantuan peningkatan ekonomi
- c. Pembangunan fasilitas masyarakat
- d. Ambulan gratis

- e. Bakti sosial
- f. Hiburan-hiburan seperti outbond
- g. Kegiatan social seperti donor darah

F. Hambatan dalam melakukan Pendidikan Politik di masyarakat Kabupaten Bantul

Dalam upaya melakukan Pendidikan politik di masyarakat, partai tidak hanya serta merta lancar begitu saja melainkan ada beberapa hambatan untuk meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi masyarakat di kabupaten bantul.

Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Media
2. Pragmatisme
3. Kemiskinan
4. Mentalitas dan Moralitas
5. Money Politik

Adapun penjelasan dari kelima poin diatas yakni sebagai berikut:

1. Media

Menurut partai PDIP media juga kurang berperan aktif untuk publikasi kegiatan-kegiatan dalam upaya melakukan pendidikan politik. Sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana upaya partai dalam hal ini. Masyarakat juga akhirnya memiliki pemikiran bahwa partai hanya selalu berkepentingan bagi diri mereka atau kepentingan kelompok untuk kekuasaan saja. Artinya seharusnya perlu adanya media yang bersifat netral yang menunjukkan secara realita

sesungguhnya terkait peran partai dalam pendidikan politik di masyarakat, karena saat ini media tentunya banyak yang berpihak ke beberapa partai saja.

2. Pragmatisme

Menurut Partai Gerindra masyarakat masih terlalu berfikir pragmatis yang tidak mau berfikir panjang, hanya berfikir jalan cepatnya seperti misalnya yang ada uangnya yang pasti di pilih. Dengan kondisi masyarakat yang pragmatis tentunya dapat menghilangkan nilai-nilai politik bersih dan juga menghambat jalannya sistem politik yang baik dan benar.

3. Kemiskinan

Menurut Partai Gerindra kemiskinan juga merupakan salah satu faktor karena masyarakat yang kurang mampu ada beberapa yang ketika di tawari dengan materi pasti dapat tergoda, hal ini juga tidak jauh berbeda dengan faktor pragmatis diatas. Sehingga perlu adanya antisipasi terhadap kemiskinan tersebut dengan dukungan dari seluruh pihak.

4. Mentalitas dan Moralitas

Mentalitas dan moralitas masyarakat kita masih terbilang lemah. Sehingga ketika memasuki era pesta demokrasi sangat mudah masyarakat kita di giring dengan cara-cara yang kurang demokratis. Maka dari itu pendidikan politik juga harus menanamkan nilai-nilai penguatan mentalitas dan moraitas masyarakat.

5. *Money Politik*

Menurut Partai PAN *money politik* juga salah satu factor besar yang menyebabkan gagalnya penumbuhan pemahaman politik yang baik dan benar di masyarakat. Ketika pesta demokrasi dimulai, mendekati pemilihan sering terjadi permainan politik yang dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan.

Dari beberapa faktor diatas tentunya menjadi tantangan yang cukup besar dan menjadi permasalahan bagi setiap partai politik dalam upaya peningkatan pendidikan politik serta pemahaman politik dan partisipasi politik masyarakat di kabupaten bantul.